

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mencari sekolah Islam yang baik di daerah pedesaan sama sulitnya mencari sekolah Katolik yang buruk,¹ di kota besar. Pernyataan yang merupakan salah satu kesimpulan disertasi Ahmad Tafsir ini, tentu tidak hanya dapat dipahami sebagai ungkapan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap kondisi lembaga pendidikan Islam, melainkan perlu dipahami pula sebagai refleksi kritis seorang intelektual yang memiliki *sense of belonging* terhadap aset umat.

Pernyataan di atas dapat diasumsikan bahwa secara kuantitas jumlah “sekolah Islam”² lebih banyak dari pada sekolah Katolik, tetapi secara kualitas lebih sedikit. Pada kenyataannya bahwa sekolah Katolik setingkat sekolah dasar banyak berada di kota dan siswanya sebagian besar anak orang mampu dengan dukungan ekonomi kuat. Sedang madrasah sebagian besar berada di daerah pedesaan dengan siswanya anak orang yang bertempat di pedesaan, sehingga tidak ada dukungan yang kuat dari segi ekonomi. Sinyalemen ini diharapkan dapat perhatian intelek muslim untuk dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam,

¹Ahmad Tafsir, *Konsep Pendidikan Muhammadiyah*, (Jakarta : Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1998),td.

²Yang dimaksud dengan sekolah Islam dalam tulisan ini adalah meliputi madrasah (MI, MTs dan MA), SD, SLTP, SMU, dan SMK yang dikelola oleh lembaga, organisasi masyarakat atau yayasan Islam termasuk Perguruan Tinggi (Agama dan Umum).

Untuk mewujudkan hal ini diperlukan studi yang serius, mendalam, dan *istiqomah*, dalam rangka pengembangan pendidikan Islam. Lebih jauh, menurut Abdullah Fadjar, umat Islam perlu mendirikan lembaga riset dan evaluasi pendidikan atau *reseach and development*.³ Melalui lembaga semacam inilah pendidikan Islam akan dapat dikaji dan dikembangkan.

Satu tema yang menjadi kajian awal dalam studi tentang pendidikan ini penting, karena dalam setiap studi disiplin ilmu apa pun akan selalu diawali dengan pengertian-pengertian atau istilah-istilah dasar yang akan dipakai dalam tema-tema kajian disiplin tersebut.

Dalam sejarah pendidikan Indonesia atau dalam studi-studi tentang pendidikan, istilah Pendidikan Islam biasanya sebatas dipahami sebagai masalah ciri khas, yaitu jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan (Islam). Demikian pula batasan yang tercantum dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁴

Pemahaman yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Zarkowi Soeyoeti. *Pertama*, Pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendiriannya dan penyelenggaraannya didorong oleh semangat dan cita-cita untuk mewujudkan nilai-nilai Islam, yang tercermin dalam nama lembaga dan aktifitas-aktifitas yang diselenggarakan. Di sini yang dimaksud kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diaktualisasikan dalam seluruh kegiatan pendidikan. *Kedua*, jenis pendidikan yang memberikan perhatian dan menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang

³A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tntangan Modernitas*, (Jakarta : Mizan, 1999), 11.

⁴00. 1, lihat pula pada UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

diselenggarakannya. Kata *Islam* sebagai bidang studi atau ilmu yang diperlakukann sebagaimana ilmu lain. *Ketiga*, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian terdahulu. Kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai dan bidang studi yang ditawarkan lewat program studi yang diselenggarakannya.⁵

Secara institusional, entitas Pendidikan Islam meliputi tiga jenis pendidikan yaitu, pesantren, madrasah, dan sekolah. Pesantren, sebagai lembaga “asli Indonesia”, selam ini dikenal sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam yang telah turut membina dan mengembangkan sumber daya manusia untuk mencapai keunggulan. Walaupun secara umum dapat dikatakan masih terbatas dalam bidang sosial keagamaan. Sebagai lembaga Pendidikan Islam, Pesantren, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sepanjang sejarah telah berperan besar dalam upaya-upaya peningkatan kecerdasan dan martabat umat Islam.⁶

Madrasah, dalam bahasa Arab adalah bentuk kata “keterangan tempat” (zharaf makan) dari akar kata *darasa*. Secara harfiah “madrasah” diartikan sebagai “tempat belajar para pelajar” atau “tempat untuk memberikan pelajaran” atau dapat diartikan dengan sekolah. Madrasah mulai muncul pada awal abad ke-20 tepatnya pada tahun 1907, dengan didirikannya madrasah Adabiyah di Padang Panjang oleh Abdullah Ahmad. Kelahiran madrasah dipicu oleh adanya ketidakpuasan masyarakat muslim terhadap kondisi sistem

⁵Lihat Malik Fajar, *Pengembangan Pendidikan Islam : Sekilas Telaah dari Sisi Alokasi posisional*, dalam Muhammad Wahyuni Nafis, *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Munawir Syazali* (Jakarta : Paramadina, 1995), 507-508.

⁶Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam : Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta : Logos, 1999), 47.

pendidikan pesantren disatu sisi, yang hanya menitikberatkan pada “agama”, dan sistem pendidikan umum (sekolah kolonial) disisi lain, yang sama sekali tidak memperdulikan agama.⁷

Dengan demikian kelahiran madrasah dilatar belakangi oleh adanya dualisme sistem pendidikan, yaitu antara pesantren dengan sistem “tradisional” dan sekolah kolonial dengan “sistem modern”. Sistem pendidikan kolonial berbeda dengan sistem pendidikan pesantren, tidak hanya dari segi metode, tetapi juga dari segi isi dan tujuannya. Pendidikan yang dikelola oleh pemerintah kolonial ditekankan pada pengetahuan dan ketrampilan “duniawi” yaitu “pendidikan umum”, sementara pendidikan pesantren lebih ditekankan pada pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi penghayatan agama.⁸

Adanya perbedaan yang mencolok dari kedua sistem pendidikan tersebut menggugah kesadaran sebagian umat Islam saat itu. Umat menyadari akan pentingnya “pendidikan umum”, tetapi tetap tidak mengesampingkan dan meninggalkan pola pesantren. Oleh sebab itu kemudian timbul ide untuk memadukan dua sistem pendidikan ini, yaitu dengan mendirikan madrasah.

Menurut B.J. Boland bahwa awal abad ke-20 merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan madrasah di hampir seluruh wilayah Indonesia, dengan nama dan tingkatan yang bervariasi. Namun demikian, madrasah-madrasah yang didirikan pada saat itu, dalam awal perkembangannya masih bersifat “diniyyah” semata, baru pada sekitar 1930 mulai dilakukan

⁷A. Timur Djailani dalam Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1996), 66.

⁸Karel A. Stenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, (Jakarta : LP3ES), 24.

pembaharuan untuk memantapkan keberadaan madrasah, khususnya dengan menambahkan “pengetahuan umum”.⁹

Sebagaimana telah kami sampaikan di atas bahwa madrasah di Indonesia adalah sebuah lembaga Pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, sebagai hasil perpaduan antara pesantren dan sekolah. Setelah melalui perjuangan yang amat panjang, akhirnya madrasah dapat duduk sejajar dengan sistem sekolah.¹⁰ Sistem pendidikan madrasah diselenggarakan dalam tiga jenjang, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).¹¹

Perjuangan itu diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan¹², dan Menteri Dalam Negeri, pada tanggal 24 Maret 1975, yang menegaskan bahwa kedudukan madrasah adalah sama dan sejajar dengan sekolah formal lain. Konsekuensinya, lulusan madrasah dapat memasuki jenjang sekolah umum lain yang lebih tinggi, atau dapat pindah ke sekolah formal lain, begitu pula sebaliknya. Puncaknya adalah lahirnya kebijakan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 2 Tahun 1989. Secara tegas, dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam.¹³

⁹B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Grafiti Pers, 1995), 121.

¹⁰Karel A. Stenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, (Jakarta : LP3ES), 24.

¹¹Bandingkan dengan nama jenjang pendidikan sekolah yang dibawah naungan Diknas yaitu SD, SMP, SMU dan SMK.

¹² Sekarang Menteri Pendidikan Nasional.

¹³ Malik Fadjar, viii

Dengan menelusuri sejarah perkembangan Pendidikan Islam, khususnya dengan memperhatikan tulisan Karel A. Stenbrink, dapat dikatakan bahwa madrasah adalah hasil sintesa dari pesantren dan sekolah, dengan demikian di antara dua titik ekstrim, pesantren dan sekolah, terdapat sebuah alternatif jenis pendidikan yaitu madrasah. Yang menarik dari ketiga jenis institusi pendidikan ini sampai sekarang tetap eksis dan hidup berkembang dengan coraknya masing-masing di tengah pesatnya modernisasi di segala bidang, termasuk pendidikan. Lembaga pendidikan yang datang kemudian tidak otomatis “melikuidasi” lembaga pendidikan yang telah ada sebelumnya. Lebih dari itu sekarang ada upaya untuk menyatukan ketiga institusi ini didalam satu atap. Hal ini dapat dilihat dari adanya pesantren yang membuka madrasah (MI, MTs, dan MA) dan sekolah (SD, SMP, dan SMU/SMK). Sebaliknya telah muncul pula “sekolah Islam” yang menerapkan *boarding school* (sistem pesantren). Dari madrasah sendiri kemudian dikembangkan pula Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) yang menerapkan *boarding school* (sistem pesantren).¹⁴

Di kalangan umat Islam sendiri, sekarang mulai marak adanya sekolah-sekolah yang mendapat predikat “unggul”, misalnya sekolah Al-Azhar, dan MIN I Malang dan lain-lain. Sekolah yang mendapat kriteria unggul tersebut memiliki karakteristik yang sama yaitu, berada di perkotaan, tempat golongan muslim menengah keatas tinggal, melakukan seleksi secara ketat dan mengenakan biaya pendidikan yang tinggi.

¹⁴Sekarang dikenal istilah “sekolah unggul”.

Persoalannya adalah bagaimana nasib “sekolah-sekolah Islam”, terutama madrasah yang berada di pedesaan. Apakah mereka juga harus mengikuti sekolah-sekolah yang berada di kota apabila berkeinginan untuk menjadi “sekolah unggul”, atau setidaknya memiliki kualitas yang standar dan dapat disejajarkan dengan sekolah-sekolah lain. Bagaimana prospek mereka untuk dapat meningkatkan kualitas diri dengan tetap memperhatikan dinamika internal dan eksternal “khas desa” yang ada dalam sistem pendidikannya. Berangkat dari pernyataan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Madrasah Ibtidaiyyah yang berada di wilayah Kecamatan Imogiri.

Madrasah lahir dan berkembang di suatu wilayah bukan semata-mata karena belum atau tidak tersedia lembaga pendidikan di wilayah itu sebelumnya. Sekalipun telah ada lembaga pendidikan, dan tidak juga kelebihan murid atau tidak ada sedikit pun halangan untuk memasukinya, tetapi tetap saja masyarakat mendirikan madrasah, sekalipun dalam keadaan kekurangan. Walaupun sudah ada sekolah umum, beberapa tokoh agama atau tokoh masyarakat berpandangan bahwa madrasah harus tetap dibangun, apalagi jika wilayah itu belum ada lembaga pendidikannya.

Lembaga pendidikan Islam yang bernama madrasah sebagai fenomena pedesaan, jelas sangat kental dengan hal-hal yang bersifat ideologis, tradisi dan budayanya masing-masing. Karena muatan ideologis itu pula madrasah tidak semua pihak dapat memasuki wilayah itu kalau belum dikenali terlebih dahulu secara baik.

Sesungguhnya yang sangat menarik masyarakat terhadap madrasah bukan bersumber pada faktor kekuatan kurikulum, tenaga pengajar atau sarana dan prasarana. Akan tetapi sebagian masyarakat menganggap madrasah sebagai lembaga pendidikan yang lebih tepat, sekalipun keadaannya sangat sederhana. Peminat madrasah telah memutuskan pilihannya tidak selalu lembaga tersebut dianggap bermutu, tetapi juga bisa karena lembaga tersebut itu dinamai madrasah bukan yang lain.

Bukan rahasia lagi dalam perbincangan mengenai madrasah selalu dimunculkan bahwa madrasah selalu tertinggal bilamana dibandingkan dengan sekolah umum. Prestasi hasil belajar para siswanya rendah, lembaga pendidikan Islam ini dikelola dengan manajemen seadanya, gurunya kurang berkualitas dan gajinya pun rendah. Begitu juga sarana dan prasarana pendidikan tersedia apa adanya, seperti tidak ada prestasi apa-apa yang dihasilkan oleh madrasah, kecuali penampilan sebagai lembaga pendidikan yang berada di belakangnya. Akan tetapi, madrasah yang disebut-sebut sebagai lembaga pendidikan yang kurang maju ini, sampai sekarang masih tetap ada, dipertahankan, dibela dan bahkan setiap tahun jumlahnya berkembang.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa madrasah yang ada di Indonesia baik yang berada di pedesaan atau di kota menjadi tiga kategori madrasah yaitu 1) madrasah tertinggal, 2) madrasah tumbuh, dan 3)

madrasah mandiri.¹⁵ Madrasah dengan berbagai tingkatan pertumbuhannya itu harus dibedakan bentuk dan jenis pembinaannya.

Berdasarkan kategori madrasah tersebut di atas, bahwa madrasah yang ada di wilayah Kecamatan Imogiri termasuk madrasah tertinggal. Madrasah tertinggal biasanya ada beberapa guru bantuan pemerintah dengan jumlahnya yang terbatas, juga guru dan kepala madrasah dari tenaga honorarium yang jumlah honor pada umumnya kecil. Pemberian honor kecil itu karena tidak tersedianya dana yang dimiliki madrasah. Adapun sumber dana madrasah berasal dari dana BOS, disamping dana iuran dari orang tua wali sebesar Rp. 10.000,- per-bulan, ini pun belum tentu dibayar secara tertib. Pendapatan madrasah ini digunakan untuk membiayai kebutuhan kehidupan madrasah, termasuk honorarium para gurunya.

Guru bantuan pemerintah sebagai tiang penyangga madrasah berangsur-angsur memasuki masa pensiun, sudah barang tentu ini masalah bagi madrasah, maka jalan terbaik adalah mencari tenaga guru mau diajak untuk membantu mengajar di madrasah dengan syarat dan kriteria tertentu untuk mendukung kelangsungan madrasah. Sebagian besar guru yang direkrut ini adalah masyarakat sekitar yang telah selesai studi, dan saat itu belum mendapatkan pekerjaan.

Madrasah yang tergolong kategori terbelakang ini pun, juga mampu mengatarkan lulusannya menjadi warga masyarakat yang baik, bisa jadi tidak kalah dengan lulusan pendidikan lain yang dianggap mampu. Disamping juga

¹⁵ Imam Suprayogo, *Quo Vadis Madrasah Pengajaran Iman Menuju Impian*, (Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2007), 45

memiliki kelebihan yaitu memimpin kehidupan keagamaan yang selalu dibutuhkan oleh komunitas muslim.

Sedang dari segi bangunan madrasah dulu sangat sederhana, tetapi sekarang sudah bagus ini pun bantuan dari pihak ketiga saat terjadi gempa tahun 2006. Sampai saat ini untuk sarana parkir bagi guru dan siswa pun belum mampu dibuat kembali karena terbentur anggaran.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Madrasah Ibtidaiyyah di Kecamatan Imogiri dilihat dari aspek manajemen dan sumber daya manusia, kurikulum dan pembelajaran, aspek siswa dan sarana & prasarana?
2. Bagaimana kondisi masyarakat di lingkungan Madrasah Ibtidaiyyah di Kecamatan Imogiri tersebut dilihat dari aspek partisipasi masyarakat terhadap perkembangan Madrasah Ibtidaiyyah?
3. Bagaimana peran masyarakat terhadap kelangsungan Madrasah Ibtidaiyyah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui kondisi internal Madrasah Ibtidaiyyah (MI) di Kecamatan Imogiri, sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing.

2. Mengetahui dinamika masyarakat di lingkungan Madrasah Ibtidaiyyah (MI) di Kecamatan Imogiri, sehingga dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi.
3. Mendeskripsikan Madrasah Ibtidaiyyah (MI) di Kecamatan Imogiri, dilihat dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, sehingga dapat mengetahui dinamika masyarakat sekitar MI.
4. Berupaya untuk dapat membuat perspektif bagi pemberdayaan madrasah di masa depan.

D. Tinjauan Pustaka

MI di Kecamatan Imogiri dari segi manajemen, sebagian besar MI belum dikelola secara memadai melalui upaya perbaikan dan profesionalisme. Di kalangan pengelola MI penerapan prinsip manajemen modern masih merupakan barang mewah. Hal ini sangat mempengaruhi proses belajar-mengajar di dalam kelas. Sedangkan dari aspek guru, kondisi sebagian besar MI, khususnya di pedesaan atau pinggiran kota masih sangat memprihatinkan.

Dari segi kuantitas, masih belum ada keseimbangan rasio jumlah guru dan murid, walaupun sudah berimbang, guru MI tidak bekerja *full-time*. Dari segi kualitas, kondisi madrasah dapat dikatakan memprihatinkan. Mereka umumnya berlatar belakang pendidikan non guru ada yang dari pesantren, dan sebagian dari Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG).

Kebanyakan mereka mengajar di MI bukan atas dasar profesi, melainkan dengan berbagai macam motif lain. Ada semata-mata untuk

dakwah, menanti pengangkatan sebagai pegawai negeri, menanti nikah, dan ada juga memang pegawai negeri. Oleh karena itu tidak terlalu salah kalau lantas masyarakat meragukan kemampuan para guru ini, baik kapasitas keilmuan maupun metodologi. Tidak terlalu salah kalau masyarakat juga enggan menyekolahkan anaknya ke MI walaupun sebenarnya mereka sangat menginginkan itu.

Dari segi konsentrasi guru dalam mengajar, keadaan madrasah pada umumnya juga kurang menggembirakan. Madrasah sering berganti-ganti guru disebabkan mereka mengajar sebagai pekerjaan sampingan atau sekedar waktu penantian. Guru sering bergantian karena masih terbatasnya guru tetap, baik negeri maupun swasta. Keadaan guru yang kurang menguntungkan ini menyebabkan proses belajar-mengajar tidak dapat berjalan dengan baik.

Secara umum telah mengungkapkan tantangan-tantangan, problem yang dihadapi, serta perspektif masa depan madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Imogiri, penulis secara khusus telah memotret dari dekat apa yang sebenarnya terjadi pada MI di desa. Penelitian ini berusaha untuk mengamati bagaimana interaksi madrasah dengan masyarakat setempat dalam upaya menuju ke arah tercapainya sebuah madrasah yang menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat. Hal ini karena pada dasarnya madrasah memiliki prinsip “dari, oleh dan untuk masyarakat”.

E. Landasan teori

Madrasah Ibtidaiyah atau disebut MI merupakan salah satu Sub-Sistem Pendidikan Islam, dapat dikaji dengan sudut pendekatan sistem pendidikan

dan kelembagaannya sebagai mekanisme alokasi posisional, maksudnya bahwa sistem pendidikan dan kelembagaannya mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan peserta didiknya ke dalam posisi atau peran ideal tertentu.

Sudut pendekatan ini dipakai karena memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian, dan terutama dengan kenyataan pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Kenyataan ini cukup berpengaruh, baik pada penilaian maupun penerimaan masyarakat terhadap pendidikan. *Pertama*, sistem pendidikan dan kelembagaannya merupakan cermin dalam keadaan masyarakat. Artinya keadaan masyarakat yang berlapis-lapis tercermin dalam kenyataan pendidikan sebagai suatu sistem. Hal ini dapat dilihat dari adanya penilaian masyarakat melalui jalur pendidikan manusia akan menjadi cerdas. *Kedua*, lembaga pendidikan yang memiliki kemampuan besar dalam menyalurkan lulusannya sesuai dengan harapan masyarakat, akan dikukuhkan kedudukannya secara lebih kuat. Dapat dimaklumi ketika masyarakat lebih memilih SD daripada MI, karena dalam benak masyarakat masih terdapat anggapan bahwa dengan masuk SD, anak mereka lebih dapat terjamin untuk masuk jenjang pendidikan selanjutnya sesuai dengan pilihan dan cita-cita mereka. *Ketiga*, orientasi alokasi posisional akan berdampak pada munculnya dorongan yang kuat di kalangan anggota masyarakat untuk mencapai tingkat pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini dapat dipahami pula, karena mereka

yang memiliki pendidikan yang tinggi dianggap akan memiliki “peluang” lebih tinggi untuk memasuki lembaga sosial ekonomi.¹⁶

Berangkat dari sudut pendekatan di atas, segera dapat dilihat bagaimana posisi dan peran pendidikan Islam dengan keragaman lembaga pendidikan yang dimilikinya. Secara jujur harus diakui bahwa kehadiran lembaga pendidikan, baik yang berbentuk madrasah, sekolah maupun perguruan tinggi yang pendirian dan pengelolaannya berafiliasi pada ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Perti, PIRI, dan lain-lain, secara umum masih belum mampu mencapai kualitas, posisi, serta peran yang diidam-idamkan. Pendidikan Islam tampak masih dalam posisi sebagai “cagar budaya” untuk mempertahankan paham-paham keagamaan tertentu, belum mampu membantu menumbuhkan mobilitas antar generasi demi generasi.¹⁷ Lembaga-lembaga tersebut masih jauh dari peran sebagai pendidikan alternatif yang menjanjikan masa depan, bahkan untuk tetap dalam posisi bertahan saja, tidak sedikit lembaga yang seakan “hidup segan mati tak mau”.

Kondisi tersebut di atas menuntut kalangan pengelola lembaga pendidikan Islam untuk bekerja keras dalam melakukan pembaharuan dan pengembangan secara profesional. Mereka harus dapat bersikap rasional dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat luas. Kurang tertariknya masyarakat untuk memilih lembaga-lembaga pendidikan Islam, sebenarnya bukan semata-mata karena telah terjadi pergeseran nilai atau memudarnya

¹⁶*Ibid*, 3-4.

¹⁷*Ibid*, 6-7.

tingkat keberagaman dalam masyarakat, tetapi karena sebagian besar lembaga tersebut kurang menjanjikan masa depan dan kurang responsif terhadap tuntutan dan permintaan masyarakat.

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih sekolah, yaitu nilai (agama), status sosial, dan cita-cita. Masyarakat yang semakin terbuka dan terdidik, yang pada umumnya lebih rasional, pragmatis, dan berpikir jangka panjang, akan semakin memiliki pertimbangan beragam dalam memilih sekolah buat anak-anak mereka.¹⁸

Namun demikian pengembangan pendidikan Islam bukanlah pekerjaan sederhana, karena hal ini memerlukan adanya perencanaan secara terpadu dan menyeluruh. Perencanaan berfungsi membantu memfokuskan pada sasaran, pengalokasian, dan kontnuitas. Selain itu perencanaan juga memerlukan adanya kejelasan terhadap masa depan yang akan dicapai atau dijanjikan kepada masyarakat sebagai konsumen pendidikan.

Penulis, melalui penelitian ini, berasumsi bahwa pembenahan dan pengembangan lembaga pendidikan Islam (khususnya Madrasah Ibtidaiyah), dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu *macroscopic* (tinjauan makro), dan *microscopic* (tinjauan mikro). Dalam pendekatan pertama, lembaga pendidikan dianalisis dalam hubungannya dengan kerangka sosial yang lebih luas. Sedangkan dalam pendekatan kedua, lembaga pendidikan dianalisis sebagai suatu kesatuan unit yang hidup dan terdapat saling interaksi di dalam dirinya sendiri. Dengan dua pendekatan ini, penulis berharap dapat lebih

¹⁸*Ibid*, 11.

memberikan gambaran yang utuh terhadap persoalan Madrasah-madrasah Ibtidaiyah yang menjadi sasaran penelitian ini.

Sebelum menguraikan madrasah dan dinamika masyarakat akan lebih jelasnya penulis menyinggung istilah madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam tempat belajar bagi peserta didik secara aktif untuk mengembangkan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Maka dari itu pendidikan merupakan kegiatan yang betul-betul memiliki tujuan, sasaran dan pendidikan menuntut terwujudnya program berjenjang melalui peningkatan kegiatan pendidikan dan pengajaran selaras dengan urutan sistematika dan perkembangan lainnya. Pendidikan merupakan proses bimbingan untuk perubahan sikap dan tata laku seseorang dengan sadar dalam rangka pendewasaan manusia dan pembentukan pribadi yang mandiri.

Istilah dinamika masyarakat bahwa masyarakat ikut menentukan berkembang dan tidaknya serta maju mundurnya madrasah atau dapat dikatakan masyarakat terlibat secara penuh proses kegiatannya, dari, oleh dan bersama rakyat. Masyarakat adalah sebuah kelompok yang hidup dalam daerah khusus (dapat bersifat/lokal/regional atau nasional).

Menurut Suparto masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal di suatu daerah tertentu dan mempunyai aturan yang mengatur tata hidup mereka menuju pada tujuan yang sama. Dari batasan tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur masyarakat adalah sebagai berikut, terdapat kelompok/kesatuan atau kolektivitas manusia telah

berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah tertentu, adanya aturan/tata tertib yang mengatur mereka untuk menuju suatu cita-cita yang sama.

Secara konseptual, pendidikan berbasis masyarakat ini adalah model penyelenggaraan yang bertumpu pada prinsip-prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat, sedang oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek/pelaku pendidikan, bukan obyek pendidikan. Pada konteks ini masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam proses pendidikan. Kemudian arti pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka. Secara singkat dapat dikatakan masyarakat perlu untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri.¹⁹

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang hidup dari, oleh, dan untuk masyarakat belum mendapat sentuhan pikiran dan tangan kita semua. Peningkatan mutu tidak akan terealisasi tanpa andil semua pihak. Untuk demi peningkatan mutunya maka madrasah perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan. Prioritas utama pembangunan madrasah adalah menciptakan citra di masyarakat bahwa madrasah yang bersangkutan memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik.

²⁰Winarno Surakhmad, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah Dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat* (Semarang : Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Tengah, 2002), 6.

Adapun konsep dinamika masyarakat meliputi peningkatan rasa kesadaran, kepedulian, kepemilikan, keterlibatan, dan tanggung jawab masyarakat terhadap madrasah. Hal ini dapat terwujud dengan terpenuhinya enam kondisi :

1. Masyarakat sendiri memiliki kepedulian dan kepekaan mengenai pendidikan.
2. Masyarakat sendiri telah menyadari pentingnya pendidikan bagi kemajuan masyarakat.
3. Masyarakat sendiri telah merasa memiliki pendidikan sebagai potensi kemajuan mereka.
4. Masyarakat sendiri telah mampu menentukan tujuan-tujuan pendidikan yang relevan bagi mereka.
5. Masyarakat sendiri telah aktif berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pendidikan.
6. Masyarakat sendiri yang menjadi pendukung pembiayaan dan pengadaan sarana pendidikan.

Di dalam pengembangan madrasah masyarakat sebagai pendukung, terlibat dan menjadi mitra serta merasa memiliki. Dengan pengertian bahwa masyarakat mempunyai peran dalam pendidikan, ikut dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan madrasah.

Dengan diberlakukannya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, menempatkan madrasah setara dengan sekolah umum. Adanya kesetaraan ini, madrasah dituntut memiliki kualitas atau mutu yang sama dengan sekolah umum dalam

segala aspeknya. Sedang untuk dapat memenuhi tuntutan kualitas, minimal madrasah harus mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada seluruh komponen yang ada. SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan termasuk didalamnya pendidikan madrasah. Adapun fungsi dari SNP adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Untuk mewujudkan madrasah yang baik dan bermutu, madrasah dituntut mampu memenuhi lingkup SNP yang meliputi delapan komponen yaitu standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, standar proses, standar isi, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan. Ke delapan standar tersebut menjadi syarat bagi semua satuan pendidikan termasuk madrasah.

Pendidikan sesuai dengan yang diembannya harus mencerminkan kemampuannya untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan peran yang multidimensial. Bertolak dari kenyataan ini, arah pengembangan pendidikan di madrasah bertujuan untuk dapat “ *Mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara*”.

Adapun prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengembangan madrasah, antara lain :

1. *Membangun prinsip kesetaraan* antara sektor pendidikan madrasah dengan pendidikan diluar madrasah. Kehadiran sistem pendidikan madrasah harus senantiasa dimaknai sebagai adanya keharusan untuk bersama-sama sistem yang lainnya mewujudkan cita-cita masyarakat. Pendidikan madrasah bukan sesuatu yang secara eksklusif terpisah dari sistem sosialnya. Pendidikan madrasah sebagai sistem terbuka yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya.
2. *Prinsip perencanaan pendidikan*, bahwa kenyataan manusia dan masyarakat senantiasa berubah, maka pendidikan juga dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dan melakukan upaya yang tepat dan secara normatif sesuai dengan cita-cita masyarakatnya. Pendidikan madrasah bersifat progresif, tidak menentang terhadap perubahan, akan tetapi mampu mengendalikan arah perubahan itu.
3. *Prinsip rekonstruksionis*, dalam kondisi masyarakat yang menghendaki perubahan mendasar, artinya juga perubahan dengan skala besar berdasarkan gagasan besar, maka pendidikan madrasah harus mampu menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh perubahan tersebut. Paham rekonstruksionis mengkritik pandangan pragmatis sebagai suatu pandangan yang cocok untuk kondisi yang relatif stabil. Pendekatan pemecahan masalah bersifat lebih berorientasi masa kini, sedang pendekatan rekonstruksionis lebih berorientasi masa depan dengan tetap berpijak pada kondisi sekarang.

4. *Prinsip pendidikan berorientasi pada peserta didik*, dalam memberikan pelayanan pendidikan sifat-sifat peserta didik yang bersifat umum maupun spesifik harus menjadi pertimbangan. Pendekatan pendidikan untuk anak di daerah terpencil tidak dapat disamakan dengan anak didik perkotaan. Termasuk dalam hal ini adalah perlunya perlakuan khusus bagi kelompok ekonomi lemah berkelainan fisik atau mental.
5. *Prinsip pendidikan multibudaya*, sistem pendidikan madrasah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayaninya bersifat plural, dan oleh karenanya pluralisme perlu menjadi acuan yang tak kalah pentingnya dengan acuan-acuan yang lain. Pluralisme merupakan faham yang menghargai perbedaan, dan akan lebih baik apabila pendidikan madrasah dapat mendayagunakan perbedaan tersebut sebagai dinamika yang bersifat konstruktif, apalagi diikat oleh kesamaan pandang ideologi.
6. *Prinsip pendidikan global*, pendidikan madrasah harus mampu berperan dalam menyiapkan peserta didik dalam konstelasi masyarakat global, dengan tetap mewajibkan untuk “melestarikan” karakter agamis-patriotis. Pembinaan karakter agamis-patriotis tetap relevan dan bahkan harus dilakukan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, penentuan subyek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan triangulasi.

Bab III membahas hasil penelitian meliputi kondisi internal Madrasah Ibtidaiyyah, kondisi eksternal Madrasah Ibtidaiyyah dan analisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Bab IV adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.